

Nama : Ranum Sri Rahayu

NPM : 2313031074

Soal Pilihan Ganda

1. Pemerintah daerah berencana membangun jembatan penghubung antardesa untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Dalam analisis biaya-manfaat ditemukan bahwa nilai *Net Present Value (NPV)* proyek positif, tetapi masyarakat sekitar menolak karena khawatir kehilangan lahan pertanian. Apa tindakan paling tepat yang mencerminkan prinsip *public accountability* dalam kebijakan publik?
 - A. Melibatkan masyarakat dalam diskusi publik untuk menyeimbangkan manfaat dan dampak sosial.
 - B. Menunda proyek hingga dana tambahan tersedia untuk kompensasi.
 - C. Tetap melaksanakan proyek karena hasil perhitungan ekonomi menunjukkan layak.
 - D. Mengalihkan proyek ke daerah lain yang tidak menimbulkan penolakan.
 - E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

KJ : A

2. Dalam investasi publik, *Internal Rate of Return (IRR)* sering kali lebih rendah daripada proyek swasta. Namun proyek tersebut tetap dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa...
 - A. Pemerintah lebih fokus pada peningkatan pendapatan negara.
 - B. Tujuan utama investasi publik adalah memaksimalkan keuntungan ekonomi makro.
 - C. Manfaat sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih diprioritaskan dibanding keuntungan finansial.
 - D. Pemerintah mengabaikan prinsip efisiensi karena keterbatasan anggaran.
 - E. Proyek publik tidak perlu dianalisis karena sumber dananya dari pajak.

KJ : C

3. Salah satu kelemahan analisis biaya–manfaat dalam proyek publik adalah sulitnya mengukur manfaat nonmoneter. Solusi terbaik untuk mengatasi hal ini adalah...
 - A. Mengabaikan manfaat nonmoneter agar hasil lebih objektif.
 - B. Mengonversi manfaat sosial ke dalam nilai ekonomi melalui *willingness to pay* atau *shadow pricing*.
 - C. Menilai semua proyek dengan parameter keuangan yang sama.
 - D. Meminta lembaga swasta melakukan audit independen.
 - E. Menggunakan data statistik makro tanpa memperhatikan konteks sosial.

KJ : B

4. Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), indikator keberhasilan kebijakan publik tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga dari...
- A. Besarnya surplus fiskal yang dihasilkan pemerintah daerah.
 - B. Tingkat realisasi anggaran terhadap target awal.
 - C. Efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan program pemerintah.
 - D. Kecepatan pelaksanaan proyek di lapangan.
 - E. Banyaknya proyek baru yang diajukan tahun berikutnya.

KJ : C

5. Salah satu tujuan penerapan *New Public Management* (NPM) dalam sektor publik adalah mendorong efisiensi birokrasi dengan prinsip manajerial seperti di sektor swasta. Namun, jika penerapan NPM dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik organisasi publik, risiko yang mungkin muncul adalah...
- A. Meningkatnya transparansi karena penggunaan indikator kinerja yang terukur.
 - B. Penguatan akuntabilitas publik melalui sistem evaluasi berbasis kinerja.
 - C. Meningkatnya kualitas pelayanan publik karena orientasi pada hasil.
 - D. Terjadinya tumpang tindih antara fungsi birokrasi dan lembaga swasta.
 - E. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

KJ: E